



# LAPORAN

## SURVEI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPKP/SPAK) TAHUN 2024

*PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN  
TANAMAN PANGAN*



AGROSTANDAR



# **Laporan**

## **Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPKP/SPAK) Tahun 2024**

**Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan  
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian  
Kementerian Pertanian  
2024**

## Kata Pengantar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, fokus pembangunan Zona Integritas (ZI) tertuju pada dua sasaran utama yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dan survei persepsi anti korupsi (SPAK).

Selain sebagai pemenuhan amanah perundangan tersebut SPKP dan SPAK berfungsi sebagai evaluasi atas pelayanan yang telah diselenggarakan sekaligus sebagai perbaikan pelayanan ke depan guna meningkatkan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan instansi pemerintah. Survei dilaksanakan terhadap mitra kerja/pengguna (pemangku kepentingan) yang telah menerima layanan PSITP, dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023. Semoga hasil survei ini memberikan informasi lengkap dan bermanfaat.

Bogor, 16 April 2024  
Kepala Pusat,



Priatna Sasmita

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya *pembangunan Zona Integritas*. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka pembangunan Zona Integritas, diantaranya adalah: (1) menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi reformasi birokrasi, serta (2) penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan (PSITP) sebagai bagian dari instansi pemerintah senantiasa berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan PSITP sebagai wilayah yang berintegritas baik di internal satuan kerja maupun lingkup PSITP yang meliputi Balai Besar Pengujian Standardisasi Instrumen Tanaman Padi (BBPSI Tanaman Padi), Balai Pengujian Standardisasi Instrumen (BPSI) Tanaman Aneka Kacang, Balai Pengujian Standardisasi Instrumen (BPSI) Tanaman Serealia dan Loka Pengujian Standardisasi Instrumen (LPSI) Tanaman Aneka Umbi. Selain sebagai komitmen terhadap pelaksanaan peraturan PSITP juga memerlukan instrumen evaluasi atas layanan yang diselenggarakan sehingga diperlukan penilaian yang objektif dari penerima layanan. Untuk mendapatkan informasi yang valid tersebut dilakukanlah survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dan survei persepsi anti korupsi (SPAK) terhadap para pengguna layanan PSITP.

## 1.2 Tujuan

- a) Mengukur nilai indeks persepsi kualitas layanan publik dan persepsi anti korupsi PSITP;
- b) Sebagai bahan pengambil kebijakan, untuk mencegah KKN dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan;
- c) Mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang bebas korupsi.

## BAB II Metodologi

Survei persepsi kualitas pelayanan publik (SPKP) dilakukan menggunakan perangkat *Google Form*. Survei ini digabung dengan survei persepsi anti korupsi (SPAK). Kedua jenis survei ini dapat diakses melalui link berikut ini [https://bit.ly/SPAKBSIP\\_PSITP](https://bit.ly/SPAKBSIP_PSITP). Sasaran responden adalah seluruh pengguna yang telah selesai mendapatkan layanan PSITP dalam waktu 3 (tiga) bulan terakhir. Tiap responden SPKP diberikan delapan pertanyaan terkait persepsi kualitas pelayanan publik. Pilihan jawaban yang diberikan menggunakan skor dari 1 s.d. 6. semakin tinggi nilainya menunjukkan persepsi responden semakin setuju/sesuai terhadap kualitas layanan yang ditanyakan dalam kuesioner. Kuesioner survei yang diberikan memuat hal-hal berikut:

1. Informasi pelayanan dapat diperoleh melalui media elektronik maupun non elektronik;
2. Persyaratan pelayanan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
3. Prosedur/alur pelayanan yang ditetapkan mudah diikuti/dilakukan;
4. Jangka waktu penyelesaian pelayanan diterima sesuai dengan yang ditetapkan;
5. Tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan telah wajar sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan;
6. Sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan mudah digunakan;
7. Petugas pelayanan/sistem pelayanan online dapat merespon keluhan dengan cepat; dan
8. Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan mudah digunakan/diakses.

Sementara responden SPAK diberikan 5 (lima) pertanyaan terkait persepsi anti korupsi dengan pilihan jawaban yang diberikan menggunakan skor dari 1 s.d. 6. Semakin tinggi nilainya menunjukkan persepsi responden semakin setuju/sesuai terhadap pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner yang diberikan adalah memuat informasi berikut:

1. Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini?
2. Tidak ada pelayanan di luar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini?
3. Tidak ada penerimaan imbalan uang/barang/fasilitas di luar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini?
4. Tidak ada pungutan liar (pungli) pada unit layanan ini?
5. Tidak ada percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan ini?

## A. Kriteria Responden

Responden yang berpartisipasi dalam survei ini adalah para pihak yang telah selesai (100%) menerima layanan PSITP dalam periode tanggal 1 Januari - 31 Maret 2024.

## B. Metode Pencacahan

Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei elektronik melalui sistem broadcast data. Broadcast data dilakukan melalui WhatsApp, SMS, Email kepada para responden. Responden menjawab setiap pertanyaan yang diberikan sesuai dengan persepsinya masing-masing atas pelayanan yang diterima dari PSITP melalui pranala [https://bit.ly/SPAKBSIP\\_PSITP](https://bit.ly/SPAKBSIP_PSITP).

**Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024**

e.paturohman@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

\* Indicates required question

### I. PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN

**1) Informasi pelayanan tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik \***

Pernyataan ini disampaikan untuk melihat bahwa sistem informasi pelayanan selalu tersedia dan dapat menjawab kebutuhan pengguna layanan, sistem informasi pelayanan mudah digunakan, serta sistem informasi pelayanan memiliki fasilitas interaktif dan *Frequently Ask Question/ FAQ*)

1. SANGAT TIDAK TERSEDIA

2. TIDAK TERSEDIA

3. KURANG TERSEDIA

4. CUKUP TERSEDIA

5. TERSEDIA

6. SANGAT TERSEDIA

Saran Perbaikan

Gambar 1. Tampilan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (SPKP) PSITP Tahun 2024

# Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024

e.paturohman@gmail.com [Switch account](#)



Not shared

\* Indicates required question

## II. PERSEPSI ANTI KORUPSI

### 1) Tidak ada diskriminasi pelayanan \*

Pernyataan ini disampaikan untuk mengetahui bahwa tidak ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya.

- 1. SANGAT TIDAK SETUJU
- 2. TIDAK SETUJU
- 3. KURANG SETUJU
- 4. CUKUP SETUJU
- 5. SETUJU
- 6. SANGAT SETUJU

Saran Perbaikan

Gambar 2. Tampilan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) terhadap layanan PSITP tahun 2024

### C. Analisis Data

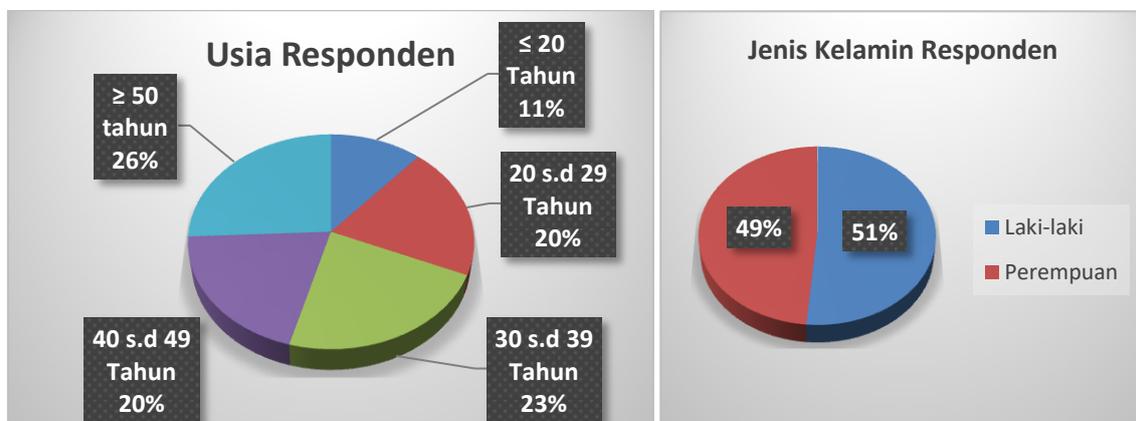
Metode yang digunakan dalam pengolahan data dan analisis survei persepsi kualitas pelayanan (SPKP) dan persepsi anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan aplikasi survei yang akan menghasilkan analisis deskriptif kuantitatif. Dalam melakukan pengisian survei, responden diberikan pilihan dengan skala 1 s.d. 6, Semakin tinggi nilai yang diberikan, menunjukkan semakin baik persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Penghitungan menggunakan pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai sebuah peristiwa dan fenomena sosial, berdasarkan dengan kuesioner yang telah diberikan yaitu Skala *Likert*. Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) menggunakan skala 4, sedangkan kuesioner pada masing-masing survey menggunakan skala 6. Oleh karena itu, perlu dilakukan konversi nilai dari skala 6 ke skala 4.

## BAB III Hasil

### 3.1. Analisis Hasil Survei

#### 3.1.1. Karakteristik Responden SPKP dan SPAK

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang sebanyak 35 responden yang berasal dari berbagai instansi pemerintah, lembaga internasional, maupun personal, dengan karakteristik hasil identifikasi responden berdasar gendernya terasuk berimbang antara laki-laki dan perempuan walaupun ada pebedaan namun hanya 1%. Dari sisi usianya responden paling besar usia  $\geq 60$  tahun, sementara yang berusia 20-29 tahun dan 40-49 tahun 20%, sedangkan 30-39 tahun 23% (Gambar 3).



Gambar 3. Karakteristik Responden Survei SPKP/SPAK PSITP 2024

### 3.1.2. Persepsi Kualitas Pelayanan PSITP

Tabel 1. menunjukkan data persepsi konsumen atas layanan PSITP dalam hal kualitas pelayanan. Hasil survei menunjukkan nilai Indeks persepsi kualitas pelayanan (IPKP) PSITP sebesar 3,45. Nilai ini mengindikasikan bahwa kinerja pelayanan PSITP mendekati kepuasan sempurna yaitu 4,0. Semakin besar indeks yang didapat mengindikasikan bahwa pelayanan sesuai dengan prosedur dan mendapatkan kepuasan dari penerima jasa layanan yang positif.

Tabel 1. Persepsi pelanggan atas pelayanan PSITP berdasarkan hasil survei SPKP tahun 2024

Persepsi	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8
1	0	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	8	0	8	20	20	16	20	20
5	110	135	105	115	100	100	90	95
6	66	48	72	42	54	66	72	66
Jumlah nilai	184	183	185	177	175	182	182	181
Nilai rata-rata skala 6	5.26	5.23	5.29	5.06	5.00	5.20	5.20	5.17
Nilai rata-rata (konversi 4 )	3.50	3.49	3.52	3.37	3.33	3.47	3.47	3.45
<b>Indeks SPKP</b>	<b>3.45</b>							

Keterangan:

- U1: informasi pelayanan
- U2: persyaratan pelayanan
- U3: prosedur/alur pelayanan
- U4: jangka waktu
- U5: tarif/biaya
- U6: sarana dan prasarana
- U7: respon pelayanan
- U8: konsultasi dan pengaduan

Secara umum kualitas layanan PSITP memuaskan namun ada beberapa hal yang masih perlu diperbaiki/ditingkatkan yaitu unsur jangka waktu (U4) dan biaya (U5). Dari sisi waktu pelayanan PSITP harus memperbaiki kecepatan dalam memberikan pelayanan. Sementara dari sisi tarif pembiayaan seluruh layanan yang diberikan PSITP bersifat gratis (tanpa biaya) hal ini perlu dipertahankan dan perlu informasi pelayanan tanpa biaya yang lebih massif lagi.

### 3.1.3. Persepsi Anti Korupsi PSITP

Dari hasil pengolahan data SPAK, diperoleh nilai indeks persepsi anti korupsi (IPAK) sebesar 3,61 (Tabel 2). Berdasarkan hasil survei tersebut mengindikasikan PSITP termasuk mendapat persepsi sebagai unit kerja anti korupsi. Dari seluruh unsur menunjukkan angka indeks SPKP di atas 3,5 hal ini mengindikasikan PSITP dalam memberikan pelayanannya tidak ada

diskriminasi, potensi kecurangan, praktik pemberian imbalan, praktik pungutan liar dan praktik percaloan. Hal positif ini perlu dipertahankan dan tentu perlu perbaikan pada sisi yang masih dirasa perlu peningkatan.

Tabel 2. Persepsi antikorupsi atas pelayanan PSITP berdasarkan hasil survei SPAK tahun 2024

Persepsi	U1	U2	U3	U4	U5
1	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0
3	0	0	0	3	0
4	12	8	8	4	8
5	70	90	80	70	85
6	108	90	102	114	96
Jumlah nilai	190	188	190	191	189
Nilai rata-rata skala 6	5.43	5.37	5.43	5.46	5.40
Nilai rata-rata (konversi 4 )	3.62	3.58	3.62	3.64	3.60
<b>Indeks SPAK</b>	<b>3.61</b>				

Keterangan:

U1: Diskriminasi pelayanan

U2: Indikasi kecurangan dalam pelayanan

U3: Praktik pemberian imbalan uang/barang

U4: Praktik pungutan liar (pungli)

U5: Praktik percaloan/perantara/biro

## B. Tindak Lanjut Hasil Survei

Berdasarkan hasil survei, PSITP memperoleh hasil survei persepsi kualitas pelayanan publik sebesar 3,45 dan hasil survei Ppersepsi anti korupsi sebesar 3,61. Perolehan ini perlu dipertahankan dengan tetap melakukan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Rencana tindak lanjut pada unsur-unsur yang memperoleh nilai rendah selain itu akan menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan responden yang disesuaikan dengan skala prioritas dan kemudahan untuk dilaksanakannya. Saran perbaikan responden disajikan dalam rangkuman Tabel 3. berikut:

Tabel 3. Saran perbaikan dari responden berdasarkan hasil survei SPKP dan SPAK tahun 2024

Komponen layanan	Saran Perbaikan
Informasi pelayanan	tetap harus menjaga dan selalu ditingkatkan mengenai situs web yang ramah pengguna, aksesibilitas seluler, fungsi pencarian, konten multimedia, kehadiran media sosial, buletin email, dukungan obrolan online, mekanisme umpan balik, dan materi offline, untuk perpustakaan ada baiknya list buku dilakukan secara komputerisasi sehingga memudahkan petugas atau pengunjung mendapatkan informasi buku yang diperlukan, sistem informasi lebih di tingkatkan lagi

Komponen layanan	Saran Perbaikan
Persyaratan layanan	selalu di jaga kualitas akan evaluasi berkelanjutan, umpan balik pelanggan, tolok ukur, pelatihan dan pengembangan, integrasi teknologi, optimasi proses, penjaminan mutu, pendekatan berpusat pada pelanggan, kolaborasi dan komunikasi, dan budaya peningkatan berkelanjutan, untuk layanan lebih di tingkatkan lagi
Alur pelayanan	dilakukannya alat bantu visual, petunjuk langkah-demi-langkah, bahasa sederhana, faq dan pemecahan masalah, pengujian pengguna, panduan interaktif, petunjuk multimedia, pertimbangan aksesibilitas, mekanisme umpan balik, dan pembaruan reguler
Waktu pelayanan	dilakukannya transparansi, fleksibilitas, komunikasi, perjanjian tingkat layanan, proses yang efisien, mekanisme umpan balik, perbaikan berkelanjutan, pelatihan dan pengembangan, dan integrasi teknologi
Tarif layanan	saran perbaikan adalah dilakukannya transparansi, daftar biaya yang dapat diakses, konsistensi, kejelasan layanan gratis, pemberitahuan awal tentang perubahan biaya, keringanan atau diskon biaya, opsi pembayaran, edukasi pelanggan, mekanisme umpan balik, kepatuhan terhadap peraturan
Sarana layanan	saran untuk perbaikan: kompatibilitas seluler, pengalaman pengguna yang dipersonalisasi, fungsi pencarian yang efisien, opsi layanan mandiri, pembaruan dan pemberitahuan waktu nyata, pemrosesan pembayaran yang aman, integrasi dengan sistem lain, mekanisme umpan balik, pemantauan dan peningkatan berkelanjutan, dan pertimbangan aksesibilitas
Respon petugas layanan	pelatihan dan pengembangan, prosedur standar, integrasi teknologi, mekanisme umpan balik, pemberdayaan, pengakuan dan penghargaan, proses yang efisien, desain yang berpusat pada pengguna, dukungan multichannel, budaya peningkatan berkelanjutan, perlu diinformasikan nomor kontak dan pic nya supaya infonya satu pintu saja
Layanan konsultasi	penanganan prioritas, respons tepat waktu, dokumentasi dan pelacakan, tim respons khusus, ketersediaan 24/7, dan saluran yang dapat diakses, ada disediakan hotline number
Diskriminasi	kebijakan dan pedoman yang jelas, tindakan akuntabilitas, promosi keberagaman dan inklusi, sistem pelaporan anonim, pemantauan dan evaluasi reguler, dan komitmen kepemimpinan
Kecurangan	kebijakan dan pedoman yang jelas, pemantauan dan pengawasan, proses transparan, masukan pelanggan, keterlibatan pemangku kepentingan
Imbalan	pedoman perilaku, pengawasan dan pemantauan, transparansi transaksi keuangan, kebijakan benturan kepentingan, kepemimpinan yang etis, dan perbaikan berkelanjutan
Pungli	kebijakan dan prosedur yang jelas, perlindungan pelapor, transparansi dan akuntabilitas, kolaborasi dengan penegak hukum, peninjauan dan perbaikan berkala, audit eksternal
Percaloan	penyaringan pemasok dan kontraktor, transparansi dalam proses pengadaan, keterlibatan langsung dengan pemangku kepentingan, ketentuan kontrak, pemantauan dan audit reguler, selalu berkomitmen dan konsisten untuk memberikan pelayanan yang terbaik.

## BAB IV Data Survei

### A. Data Responden

No	Nama	Usia	Nama Perusahaan/Instansi
1	Rian Juliansyah	20 s.d. 30 tahun	SMK ALHAFIDZ
2	Ita Haniyati	40 s.d. 50 tahun	SMK Wiyata Mandala Bogor
3	Arla Aurelia Ibrahim	Kurang dari 20 tahun	SMK Wiyata Mandala Bogor
4	Salsa Suwandi	Kurang dari 20 tahun	SMK Wiyata Mandala Bogor
5	Amiyarsi Mustika Yukti	Lebih dari 50 tahun	Balai Besar PPMBTPH
6	Edi Husen	Lebih dari 50 tahun	Brin
7	Nono Carsono	Lebih dari 50 tahun	Universitas Padjadjaran
8	Gunawan sutio	Lebih dari 50 tahun	Asosiasi Bioagroinput Indonesia
9	Silfan Yusman	Lebih dari 50 tahun	PT. Hingkong Tailor
10	T.I. Joni Yasa	40 s.d. 50 tahun	CV Smart Fortuna Konsultama
11	Yaya Kusmayadi	Lebih dari 50 tahun	PT. Enhaii Mandiri 186
12	Nia Kurniasih	40 s.d. 50 tahun	RS UMMI
13	Okky Dwi Purwanto	30 s.d. 39 tahun	BRIN
14	Devanda Ayu L. P. P.	20 s.d. 29 tahun	IRRI
15	Fadlan Solichin	20 s.d. 29 tahun	IRRI
16	Dini Handayani Djajadiredja	40 s.d. 49 tahun	IRRI Indonesia
17	Tri Selasa	30 s.d. 39 tahun	IRRI
18	Dermawan Pamungkas	30 s.d. 39 tahun	Denis Print Digital Printing
19	Diah Wurjandari Soegondo	Lebih dari 50 tahun	IRRI
20	Rachmasari	40 s.d. 49 tahun	CV KARYA JASA ABADI
21	Angga Kusuma	30 s.d. 39 tahun	CV Dayaprima Simetris
22	Herta Novalina Sipayung	30 s.d. 39 tahun	IRRI
23	Lana Sadila	20 s.d. 29 tahun	Perpustakaan Kota Malang
24	Mulyadi	Lebih dari 50 tahun	BB BIOGEN
25	Iwan Adidharmawan	Lebih dari 50 tahun	IRRI
26	Nita Sari	20 s.d. 29 tahun	BSIP
27	Firmansyah	40 s.d. 49 tahun	PT Cargill Indonesia
28	Risky maulidin	Kurang dari 20 tahun	SMK YKTB 2
29	Rio Irawan	Kurang dari 20 tahun	SMK Yktb 02
30	Qonita	30 s.d. 39 tahun	PSIPKH
31	Rudi	30 s.d. 39 tahun	Megantara
32	Rezkia	20 s.d. 29 tahun	Bogor
33	Dara Karamatika Larasati, S.Sos	20 s.d. 29 tahun	Sekretariat BSIP
34	Nindya Malvins Trimadya	40 s.d. 49 tahun	Badan Standardisasi Nasional
35	Windri Widyaningsih	30 s.d. 39 tahun	BSN

## B. Data Dukung Lainnya

Tautan survei ini adalah [https://bit.ly/SPAKBSIP\\_PSITP](https://bit.ly/SPAKBSIP_PSITP). Berikut tampilan tautan survei:

### Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2024

e.paturohman@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

\* Indicates required question

#### Informasi Umum

Dalam rangka peningkatan integritas dan kualitas pelayanan lingkup Kementerian Pertanian, Inspektorat Jenderal melakukan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Antikorupsi (SPAK) pada Satker/UPT lingkup Kementerian Pertanian. Survei ini dilakukan untuk memberikan gambaran kualitas pelayanan publik dan perilaku antikorupsi pada unit layanan lingkup Kementan, melalui kualitas pelayanan, perilaku penyimpangan pelayanan, evaluasi dan perbaikan pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kesediaan Saudara untuk mengisi kuesioner ini secara lengkap, jujur, konsisten dengan kondisi yang sebenarnya. **Identitas responden**